



FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jl. Akasia 16 No. 124 Denpasar

Kepada:

Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan Bali

Perihal :

Laporan Maladministrasi DPRD Provinsi Bali

Keluarnya SK Gubernur Bali nomor 2138/02-C/HK/2012 mengenai Ijin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali yang menggunakan rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 sebagai salah satu pertimbangannya telah menjadi polemik di masyarakat.

Kemudian DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi DPRD Provinsi Bali nomor 900/2569/DPRD tertanggal 12 Agustus 2013 perihal Peninjauan Ulang dan/atau Pencabutan SK Gubernur Bali nomor 2138/02-C/HK/2012 dan dengan pernyataan lisan Gubernur Bali telah menyatakan mencabut SK tersebut. Namun ironisnya DPRD Bali belum mencabut rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012.

Kami dari ForBALI (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) menduga telah terjadi maladministrasi dalam hal dikeluarkan dan tidak dicabutnya rekomendasi DPRD Provinsi Bali no. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012.

Beberapa pertimbangan kami terkait maladmitsitansi yang dilakukan DPRD Provinsi Bali adalah:

1. DPRD Bali sebagai salah satu penyelenggara negara sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan *Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
2. Dalam UU No 37 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 1 angka 3 menyatakan *Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan*



FORUM RAKYAT BALI TOLAK REKLAMASI

Jl. Akasia 16 No. 124 Denpasar

Perbuatan melanggar hukum dan kelalaian yang telah dilakukan DPRD Bali adalah dengan memberikan dukungan untuk eksekutif menindaklanjuti kajian dari LPPM Universitas Udayana terkait pemanfaatan pengembangan perairan Teluk Benoa. Kajian dan SK Gubernur Bali nomor 2138/02-C/HK/2012 bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU 27 Th 2007, Perpres no. 45 tahun 2011, Perpres no. 122 tahun 2012, Perda Provinsi Bali no. 16 tahun 2009.

Keluarnya rekomendasi no. 660/14278/DPRD juga diduga tidak melalui mekanisme dan tata tertib DPRD Provinsi Bali. Hal ini disampaikan anggota oleh DPRD yang dimuat di media massa.

Untuk itu kami meminta Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan Bali segera menindaklanjuti laporan kami sesuai dengan wewenang dan tugas Ombudsman. Bersama ini kami juga melampirkan beberapa bukti awal untuk mendukung laporan kami.

Denpasar, 23 Agustus 2013

ForBALI'

i⁰ **ForBALI** adalah aliansi masyarakat sipil lintas sektoral yang terdiri dari lembaga dan individu baik mahasiswa, LSM, seniman, pemuda dan individu-individu yang peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa Reklamasi Teluk Benoa adalah kebijakan penghancuran Bali. Adapapun yang tergabung dalam ForBALI adalah:

FRONTIER (Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali), KEKAL (Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali), GEMPAR Teluk Benoa (Gerakan Masyarakat Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa), WALHI Bali, Sloka Institute, Mitra Bali, PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) Bali, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Bali, Kalimajari, Yayasan Wisnu, Manikaya Kauci, Komunitas Taman 65, Komunitas Pojok, Bali Outbound Community, Penggak Men Mersi, BEM Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Bali, PPMI DK Denpasar, Eco Defender, Nosstress, The Bullhead, Geekssmile, Superman Is Dead, Navicula, Devildice, Dialog Dini Hari, Ganjil, Nymphaea, The Dissland, The Sneakers, The Hydrant, Goldvoice, Rootsradical, The Brews, Blackened, Ripper Clown, Scared of Bumbs, Suicidal Sinatra, Ugly Bastard, Steel Bone Rigid, Rollfast, Suitcase for Kennedy, Tha Kantin, Ska Teenagers Punk, Durhaka, Refugee, Hyena Wants a Party, Patrick The Bastard, The Room, Billy Bob Cats, serta individu-individu yang peduli keselamatan Bali.